

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TIMUR
(Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010-2015)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Ferry Sutiono
155020104111003**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TIMUR (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010-2015)

Ferry Sutiono¹, Wildan Syafitri²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: fe.ferry@gmail.com

ABSTRAK

Sutiono, Ferry. 2018. *Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2015)*. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Pembimbing: Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME.

Perkembangan perekonomian di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir memunculkan masalah tersendiri dalam pemerataan pendapatan. Tingginya pertumbuhan ketimpangan pendapatan menjadi problema yang harus diatasi oleh pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah adalah kebijakan fiskal yang diantaranya melalui instrumen belanja pemerintah. Belanja modal pemerintah menjadi instrumen yang spesial karena karakteristik barang yang diperoleh bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal Kementerian/ Lembaga dan pengaruh belanja modal APBD pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel dengan mengambil populasi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal K/L berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Sedangkan belanja modal APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur.

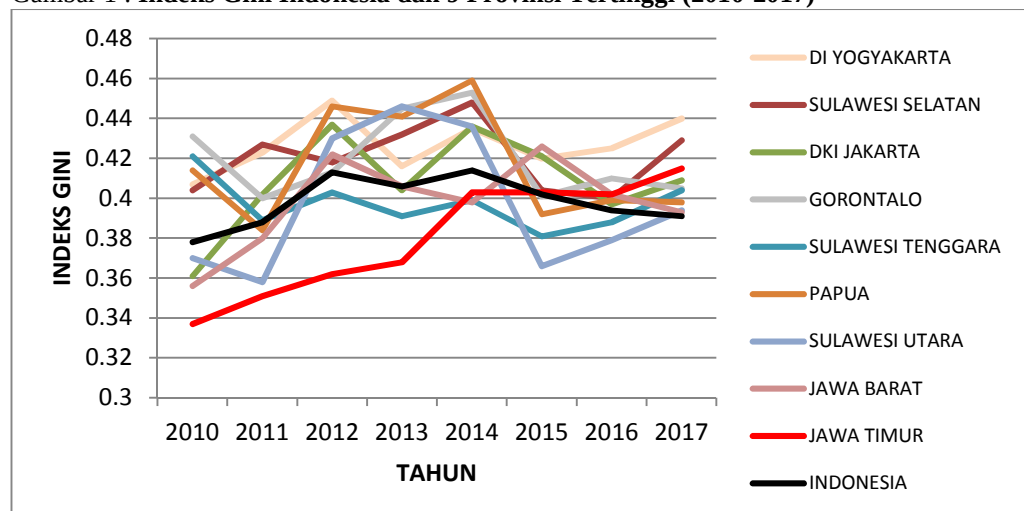
Kata Kunci: ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah, belanja modal pemerintah

A. PENDAHULUAN

Tingkat ketimpangan pendapatan menjadi salah satu variabel yang mencerminkan ukuran pemerataan kesejahteraan apakah berlaku umum atau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakatnya. Hasil dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa jadi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat tertentu.

Pada tahun 2017, rata-rata ketimpangan pendapatan di Indonesia cukup tinggi yaitu mencapai angka 0,391 pada ukuran indeks gini. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 9 provinsi yang memiliki angka ketimpangan di atas rata-rata nasional (gambar 1).

Gambar 1 : Indeks Gini Indonesia dan 9 Provinsi Tertinggi (2010-2017)



Sumber: Data Diolah BPS, 2018

Indeks gini Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 adalah yang paling rendah dibandingkan sembilan provinsi lainnya dalam gambar di atas. Angka ketimpangan Jawa Timur dari tahun ke tahun terus naik hingga akhirnya berada di atas angka indeks gini nasional sejak tahun 2015, dan pada tahun 2017 menempati urutan ketiga provinsi dengan angka ketimpangan pendapatan terbesar di Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur yang mana di satu sisi harus tetap menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, sementara di sisi lain juga dituntut untuk menurunkan tingkat ketimpangan demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam menjalankan aktivitasnya, pemerintah menggunakan instrumen belanja yang tertuang dalam APBN dan APBD untuk mendanai semua kegiatannya. Sebagian dari belanja pemerintah tersebut dialokasikan dalam pos belanja modal. Belanja modal pemerintah merupakan permintaan atas output perekonomian dalam rangka pembentukan aset yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Oleh karena itu belanja modal menjadi investasi pemerintah pada sektor publik yang sangat penting untuk mendorong perekonomian dan pemerataan pendapatan karena dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penulis melakukan pengujian pengaruh belanja modal pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan. Penulis mengambil judul " Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur" dengan studi kasus pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2010-2015.

B. KAJIAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal menimbulkan pengelolaan keuangan yang terpisah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu memberikan peluang yang lebih besar bagi setiap daerah untuk melaksanakan aktivitas pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan dari daerah tersebut. Khusaini (2006:46, dalam Hakim, 2014) mengemukakan bahwa pengeluaran publik terutama penyediaan infrastruktur bagi masyarakat akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah (sub-national government) daripada oleh pemerintah pusat karena mereka akan lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Pengeluaran Pemerintah dan Belanja Modal

Peran belanja pemerintah dalam perekonomian dapat dijelaskan melalui Fungsi Pendapatan Nasional yang dikemukakan oleh Keynes. Belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB) suatu negara, atau produk domestik regional bruto (PDRB) suatu wilayah. Belanja pemerintah tidak menyertakan komponen pembayaran transfer karena tidak terdapat pertukaran dengan sebagian output barang dan jasa perekonomian. Sebagai salah satu komponen pengeluaran, belanja pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan (Mankiw, 2007).

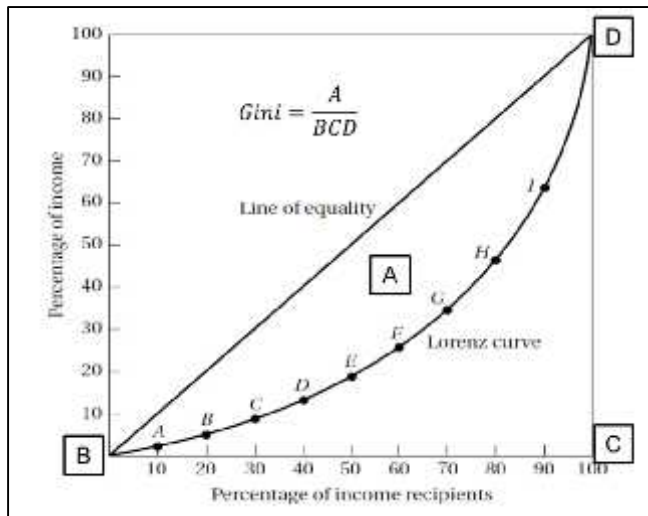
Pengeluaran pemerintah secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu (i) pengeluaran pemerintah untuk belanja barang dan jasa, (ii) pengeluaran pemerintah untuk pembayaran gaji pegawai, dan (iii) pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer payment. Belanja modal merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam klasifikasi belanja barang dan jasa. Belanja modal digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode anggaran. Output dari belanja modal adalah perolehan aset yang dapat memberikan manfaat melebihi satu periode akuntansi sehingga pada umumnya dapat digunakan dalam jangka panjang sesuai masa manfaat ekonomis aktiva tersebut.

Ketimpangan Pendapatan

Kurva Lorenz sering kali menjadi alat pengukuran ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Kurva Lorenz menggambarkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase dari total pendapatan diterima dalam satu periode tertentu (Todaro, 2012). Semakin jauh Kurva Lorenz dari garis diagonal (garis pemerataan sempurna) maka semakin

lebar tingkat ketimpangan pendapatan. Bentuk dari Kurva Lorez sebagaimana tergambar dalam gambar 2.

Gambar 2 : Kurva Lorez



Sumber: Todaro, 2012

Selanjutnya untuk menghitung tingkat ketimpangan suatu wilayah dapat diperoleh dengan menghitung rasio area antara garis diagonal dan Kurva Lorez (area A yang diarsir) yang dibagi dengan luas setengah persegi dimana Kurva Lorez berada (area segitiga BCD). Rasio inilah yang disebut dengan indeks gini. Nilai indeks gini yang dihasilkan berkisar antara 0 yang mencerminkan pemerataan sempurna dan 1 yang mencerminkan ketidakmerataan sempurna. Semakin tinggi nilai indeks gini semakin lebar pula ketimpangan pendapatan, sebaliknya semakin rendah nilai indeks gini mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Hubungan antara Belanja Modal dengan Ketimpangan Pendapatan

Belanja modal pemerintah merupakan pembelian sebagian *output* perekonomian. Pembelian tersebut menjadikan belanja modal sebagai konsumsi pemerintah yang mencerminkan permintaan atas barang modal. Selanjutnya permintaan dalam perekonomian direspon oleh produsen dengan memproduksi barang modal yang diinginkan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi produsen dan dapat pula memberikan upah bagi para pekerja. Pengadaan belanja modal yang bersifat padat karya misalnya pembangunan infrastruktur publik akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga memberikan penghasilan bagi para pekerja.

Belanja modal juga merupakan investasi pemerintah karena barang yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Apabila barang modal tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, maka belanja modal secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi dalam jangka panjang pula. Sedangkan untuk *output* belanja modal dalam bentuk barang publik dapat digunakan untuk mendorong efisiensi produktivitas, perdagangan, dan memperlancar akses pemerataan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan akan mendorong perekonomian ke arah penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat memberikan penghasilan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka ketimpangan pendapatan juga akan turun.

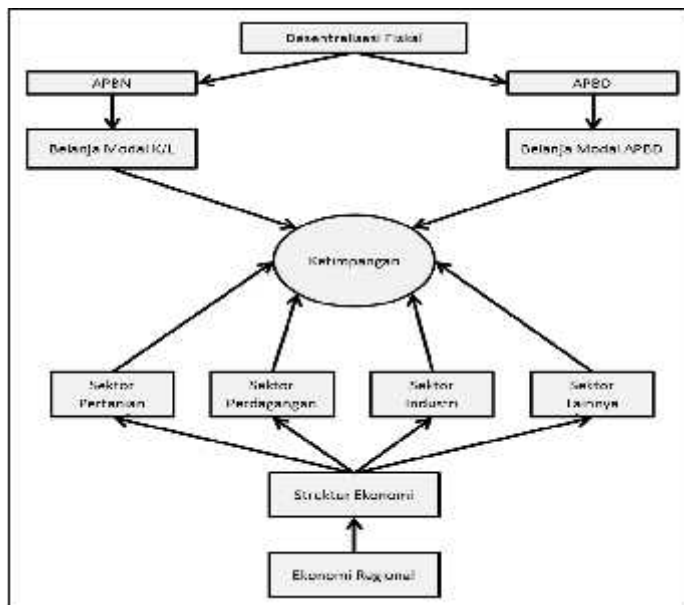
Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan *inkonsistensi* hasil pengujian antara belanja modal dengan ketimpangan pendapatan. Lopez (2010) dalam tulisannya yang berjudul *Pro-growth, pro-poor : Is there a trade-off?* mengemukakan bahwa infrastruktur publik merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan sekaligus menurunkan ketimpangan. Sementara itu, Utama (2017) menyimpulkan bahwa belanja infrastruktur pemerintah Indonesia tidak berpengaruh terhadap pengurangan ketimpangan tetapi berpengaruh terhadap pertumbuhan. Faktor anggaran yang kecil dan pemerataan sebaran menjadi permasalahan. Kondisi infrastruktur yang tertinggal dan terkonsentrasi khususnya di Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi, menyebabkan belanja infrastruktur tidak signifikan mengurangi ketimpangan.

Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Turnovsky (2015) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa belanja pemerintah untuk modal publik akan meningkatkan ketimpangan kesejahteraan dari waktu ke waktu. Investasi pemerintah cenderung meningkatkan produktivitas modal swasta yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan distribusi hasil yang tidak merata antara pemilik modal dengan para buruh. Hasil yang sama diperoleh oleh Sabir (2015) dengan studi kasus di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyimpulkan bahwa alokasi belanja modal pada APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya bahwa peningkatan belanja modal dalam APBD akan meningkatkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan alokasi belanja modal lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan dibandingkan alokasi di wilayah pedesaan. Hasil ini sejalan pula dengan penelitian Hur (2014) dalam tulisannya berjudul *Government Spending and Inclusive Growth in Developing Asia* menyatakan bahwa pengeluaran belanja modal berpengaruh positif terhadap ketimpangan, sehingga diperlukan belanja lain seperti belanja kesehatan dan pendidikan yang cukup untuk mengurangi ketimpangan.

Kerangka Pemikiran

Gambar 3 : Kerangka Pemikiran



Hipotesis

1. Diduga belanja modal K/L berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan;
2. Diduga belanja modal APBD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yang menitikberatkan kepada pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan data pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2015. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Penelitian menggunakan variabel rasio terhadap PDRB sebagai variabel bebas, antara lain rasio belanja modal Kementerian/Lembaga (RBMKL), rasio belanja modal APBD (RBM APBD), rasio PDRB sektor pertanian (RPDRBTAN), rasio PDRB sektor industri (RPDRBIND), dan rasio PDRB sektor perdagangan (RPDRBDAG). Variabel-variabel tersebut akan diregresikan terhadap variabel terikat yaitu ketimpangan pendapatan (GINI) untuk mengetahui pengaruhnya. Model atau fungsi yang akan digunakan adalah:

Ketimpangan pendapatan = f (rasio belanja modal K/L, rasio belanja modal APBD, rasio PDRB sektor pertanian, rasio PDRB sektor industri, rasio PDRB sektor perdagangan)

Model di atas dituangkan dalam persamaan:

$$GINI_{it} = \alpha + \beta_1 RBMKL_{it} + \beta_2 RBMAPBD_{it} + \beta_3 RPDRBTAN_{it} + \beta_4 RPDRBIND_{it} + \beta_5 RPDRBDAG_{it} + \varepsilon_{it}$$

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effects Model* diperoleh hasil sebagaimana pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 : **Hasil Regresi**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.280980	0.137201	2.047940	0.0420
RBMKL	-2.409618	0.992726	-2.427274	0.0162**
RBMAPBD	1.801513	0.559401	3.220431	0.0015***
RPDRBTAN	-0.274091	0.292699	-0.936427	0.3503
RPDRBIND	-0.898113	0.504133	-1.781500	0.0765*
RPDRBDAG	1.515984	0.478831	3.166008	0.0018***

Keterangan: * $\alpha=0,1$; ** $\alpha=0,05$; *** $\alpha=0,01$

Sumber: Data Diolah, 2018

Secara ringkas, hipotesis dan hasil regresi data panel dengan menggunakan *fixed effects model* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2 : **Hipotesis dan Hasil**

Variabel	Hipotesis	Hasil	Keterangan
Belanja Modal K/L	Negatif dan signifikan	Negatif dan signifikan	Hasil sesuai hipotesis
Belanja Modal APBD	Negatif dan signifikan	Positif dan signifikan	Hasil tidak sesuai hipotesis

Sumber: Penulis, 2018

Pengaruh Belanja Modal K/L Terhadap Ketimpangan

Hasil regresi untuk variabel rasio belanja modal K/L dalam penelitian ini menghasilkan output berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Artinya bahwa semakin besar rasio belanja modal K/L terhadap PDRB akan memberikan dampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendukung pemerataan pendapatan.

Penambahan belanja modal K/L dapat mengurangi tingkat ketimpangan apabila menghasilkan rasio terhadap PDRB yang lebih besar dari sebelumnya. Artinya persentase kenaikan belanja modal K/L harus melebihi persentase kenaikan PDRB pada tahun yang sama. Jadi variabel belanja modal K/L dapat menjadi variabel penyeimbang dalam rangka menciptakan pemerataan ekonomi.

Hasil ini sesuai dengan dugaan awal bahwa belanja modal pemerintah yang dilaksanakan oleh K/L berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Belanja modal yang dilakukan oleh K/L secara signifikan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hur (2014) dan Turnovsky (2015) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pengeluaran belanja modal akan meningkatkan ketimpangan.

Pengaruh Belanja Modal APBD Terhadap Ketimpangan

Hasil regresi untuk variabel rasio belanja modal APBD dalam penelitian ini menghasilkan output berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Artinya bahwa semakin besar rasio belanja modal APBD terhadap PDRB akan memberikan dampak pada naiknya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat sehingga dapat menghambat pemerataan pendapatan.

Penambahan belanja modal APBD akan dapat menaikkan tingkat ketimpangan apabila menghasilkan rasio terhadap PDRB yang lebih besar dari sebelumnya. Artinya apabila persentase kenaikan belanja modal APBD melebihi persentase kenaikan PDRB pada tahun yang sama maka akan mendorong naiknya ketimpangan pendapatan.

Hasil ini tidak sesuai dengan dugaan awal bahwa belanja modal APBD dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Akan tetapi hasil ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Hur (2014) yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja modal berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Turnovsky (2015) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa belanja pemerintah untuk modal publik akan meningkatkan ketimpangan kesejahteraan dari waktu ke waktu. Turnovsky berpendapat bahwa investasi pemerintah cenderung meningkatkan produktivitas modal swasta yang pada akhirnya terjadi ketimpangan distribusi hasil yang tidak merata antara pemilik dengan para buruh.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Sabir (2015) dengan studi kasus di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyimpulkan bahwa alokasi belanja modal pada APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya bahwa peningkatan belanja modal dalam APBD akan meningkatkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena alokasi belanja modal lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di daerah perkotaan dibandingkan alokasi di wilayah pedesaan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Belanja modal K/L berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Jawa Timur. Artinya penambahan belanja modal K/L dapat memberikan dampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan apabila kenaikannya melebihi tingkat perubahan PDRB pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal K/L cukup efektif dalam mendukung pemerataan pendapatan masyarakat.
2. Belanja modal APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Jawa Timur. Artinya penambahan belanja modal APBD dapat memberikan dampak pada naiknya tingkat ketimpangan pendapatan apabila kenaikannya melebihi tingkat perubahan PDRB pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal APBD belum efektif dalam mendukung pemerataan pendapatan masyarakat.

Saran

Menimbang kesimpulan yang telah diambil, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah dapat menjadikan variabel rasio belanja modal K/L dan rasio belanja modal APBD sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan anggaran.
2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan khususnya pada belanja modal APBD agar dapat turut berperan dalam penurunan ketimpangan pendapatan.
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan belanja infrastruktur dan memperluas pembangunan hingga ke pelosok daerah agar dampak dari belanja infrastruktur dapat lebih berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat pinggiran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga jurnal ilmiah ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2017. [Seri 2010] Distribusi PDRB Terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2010-2016 (Persen). (<https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/10/07/959/-seri-2010-distribusi-pdrb-terhadap-jumlah-pdrb-34-provinsi-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi-2010-2016-persen-.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.

- _____.2018. Gini Ratio Provinsi 2002-2017. (<https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/04/26/1116/gini-ratio-provinsi-2002-2017.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- _____.2018. Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan Menurut Pengeluaran. Tabel Dinamis. diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- _____.2018. PDRB ADH Berlaku Menurut Pengeluaran. Tabel Dinamis. diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2010-2014*.
- _____.2016. Gini Rasio Jawa Timur 2008 – 2015. (<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2016/10/13/10/gini-rasio-jawa-timur-2008---2015.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- _____.2016. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2005 – 2015. (<https://jatim.bps.go.id/statictable/2016/10/12/358/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-kabupaten-kota-dan-lapangan-pekerjaan-utama-tahun-2005---2015.html>) diakses pada tanggal 17 April 2018.
- _____.2017. Distribusi PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016. (<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/36/distribusi-pdrb-provinsi-jawa-timur-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010-2016-persen-.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- _____.2017. PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016. (<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/34/pdrb-provinsi-jawa-timur-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010-2016-milyar-rupiah-.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- _____.2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*.
- _____.2018. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Terhadap PDRB 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2010-2016. (<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/01/16/207/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-terhadap-pdrb-38-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2010-2016.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- _____.2018. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2010-2016. (<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/01/16/223/pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2010-2016.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- _____.2018. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2010-2016. (<https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/01/16/221/pdrb-perkapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2010-2016.html>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- Barro, Robert J. 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth. *Journal of Political Economy*, Vol. 98, Ed. 5, PP 103–125. (<https://doi.org/10.1086/261726>) diakses pada tanggal 17 Februari 2018.
- Boediono. 1982. *Ekonomi Makro*. BPFE FEB UGM: Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. Data Keuangan Daerah Setelah 2006. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>) diakses pada tanggal 4 Februari 2018.
- Gujarati, D. N., Dawn C. Porter. 2008. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill/Irwin – USA
- Hakim, Lukman. 2014. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali*. Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang.

- Hur, Seok-Kyun. 2014. Government Spending and Inclusive Growth in Developing Asia. *ADB Economics Working Paper Series No. 415, PP 1-39*. (<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/149219/ewp-415.pdf>) diakses pada tanggal 5 Februari 2018.
- Ivanic, Maros, Will Martin. 2017. Sectoral Productivity Growth and Poverty Reduction: National and Global Impacts. *World Development*. (<http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.07.004>) diakses pada tanggal 18 Februari 2018.
- Jhingan, M.L. 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Kuznet, S. 1955. Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, Vol. 45, No.1, PP 1-28. (<http://www.jstor.org/stable/1811581>) diakses tanggal 5 Februari 2018.
- Latumaerissa, Julius R. 2015. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- López, J. . 2010. *Pro-growth, pro-poor: Is there a trade-off*. The World Bank (PRMPR). (http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/15040_WBSWP3378.pdf) diakses pada tanggal 5 Februari 2018.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi: Edisi Keenam*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Okun, A. M. 1975. *Equality and Efficiency: The Big Tradeoff*. [https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/files/content/docs/OKUN_EQUALITY_AND_EFFICIENCY_\(AS08\).PDF](https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/files/content/docs/OKUN_EQUALITY_AND_EFFICIENCY_(AS08).PDF)) diakses pada tanggal 5 Februari 2018.
- Rubin, A., & Segal, D. 2015. The effects of economic growth on income inequality in the US. *Journal of Macroeconomics*, Vol. 45, PP 258–273. (<https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2015.05.007>) diakses pada tanggal 5 Februari 2018.
- Sabir, Yustika, A. E., Susilo, & Maskie, G. 2015. Local Government Expenditure, Economic Growth and Income Inequality in South Sulawesi Province. *Journal of Applied Economics and Business* Vol. 3, Ed. 2, PP 61–73. (<http://www.aebjournal.org/articles/0302/030205.pdf>) diakses tanggal 3 Februari 2018.
- Shin, I. 2012. Income inequality and economic growth. *Economic Modelling*, Vol. 29, Ed. 5, PP 2049–2057. (<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.02.011>) diakses pada tanggal 5 Februari 2018.
- Sukirno, Sadono. 2017. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Kencana: Jakarta.
- Todaro, Michael P., Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi: Edisi Kesebelas*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Todaro, Michael P., Stephen C. Smith. 2012. *Economic Development 11th Ed*. Pearson Higher Ed. USA.
- Turnovsky, S. J. 2015. Economic growth and inequality: The role of public investment. *Journal of Economic Dynamics and Control*, Vol. 61, PP 204–221. (<https://doi.org/10.1016/j.jedc.2015.09.009>) diakses pada tanggal 9 Februari 2018.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Utama, Zamrud Siswa. 2017. *Pengaruh Kebijakan Fiskal pada Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi Indonesia: Studi Kasus 1980-2015*. Tesis. Universitas Brawijaya: Malang.